

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara

Putri Ramadana¹; Alsanah Alsanah²; Desi Arianta Br Surbakti³;
Fachri Ikram⁴; Yulia Sari Purba⁵

Prodi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi

Email : putrirdnn12@gmail.com¹; halsanah65@gmail.com²; desiarianta22@gmail.com³;
fachriikram420@gmail.com⁴; yuliasari18juli@gmail.com⁵

Address : Jl. Gatot Subroto No. KM, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal,
Kota Medan, Sumatera Utara 20122

Corresponding author : putrirdnn12@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze budget realization reports in measuring the financial performance of the Manpower Agency of North Sumatra Province for the period 2018-2022. The descriptive quantitative method was used by analyzing secondary data in the form of budget realization reports obtained from the official website of the North Sumatra provincial government. The results showed that the average effectiveness ratio was 80.49% which was included in the quite effective criteria, while the average efficiency ratio was 25.43% which was included in the very efficient criteria. In general, it can be concluded that the financial performance of the manpower agency was quite good but still needs improvement to achieve the targets that have been set.*

Keywords : *Financial Performance, Effectiveness, Efficiency*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran dalam mengukur kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2018-2022. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menganalisis data sekunder berupa laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari situs resmi pemerintah provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas rata-rata sebesar 80,49% termasuk cukup efektif, sedangkan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 25,43% termasuk sangat efisien. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dinas tenaga kerja cukup baik akan tetapi masih perlu peningkatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Efektivitas, Efisiensi

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik di Indonesia telah berkembang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk secara leluasa mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan prinsip daerah otonom. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu mendanai kepentingan daerahnya demi meningkatkan kemandirian secara fiskal.

Kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah menetapkan bahwa setiap wilayah bertanggung jawab untuk mengurus keuangannya sendiri. Seiring upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat, saat ini, UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah telah diterapkan, serta dikeluarkan kebijakan tambahan melalui UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejak pemberlakuan UU No. 33

Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan prinsip dan norma dasar negara Indonesia.

Salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Laporan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, dalam Laporan Keuangan terdapat 7 komponen Laporan Keuangan yang salah satunya yakni Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, akan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, dan juga menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah, tujuan pentingnya adalah mencapai kinerja keuangan yang optimal. Kinerja keuangan diukur dengan indikator keuangan dan analisisnya bertujuan menilai sejarah kinerja melalui berbagai analisis, mencapai gambaran keuangan yang mencerminkan kondisi aktual entitas dan potensi kinerja yang akan berlanjut.

Pengukuran kinerja adalah langkah untuk menilai sejauh mana pencapaian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis kinerja keuangan memiliki tujuan mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, melihat potensi dan sumber ekonomi, menilai kondisi keuangan, menilai kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban, serta memastikan bahwa pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) merupakan salah satu SKPD yang ada di provinsi Sumatera Utara. Dinas Tenaga Kerja bertugas melaksanakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

Tabel 1.
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara
Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan	
	Anggaran	Realisasi
2018	2.352.000.000,00	2.362.458.300,00
2019	2.362.458.000,00	1.777.481.300,00
2020	1.505.000.000,00	2.006.757.700,00
2021	1.910.000.000,00	1.769.698.740,00
2022	1.510.000.000,00	12.000.000,00
Tahun	Belanja	
	Anggaran	Realisasi
2018	53.163.458.948,00	50.074.261.993,00
2019	54.462.365.423,62	49.453.131.346,00
2020	44.100.158.875,00	41.876.466.317,00
2021	50.200.740.052,00	47.022.066.385,16
2022	67.237.838.277,00	64.089.637.328,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja Disnaker pada tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 tidak mampu megumpulkan pendapatan sesuai anggaran. Namun pada tahun 2020 mampu melampaui anggaran pendapatan yang ditetapkan. Sehingga dapat dilihat bahwa kinerja Disnaker belum efektif karena mengalami fluktuasi. Sedangkan pada aspek belanja Disnaker tahun 2018-2022 mampu melakukan kegiatan belanja tanpa melebihi anggaran yan telah ditetapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi laporan realisasi anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara Tahun 2018-2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis tertarik menganalisa sejauh mana pemerintah memenuhi kewajiban dan melaksanakan anggaran dengan menggunakan dua rasio yaitu rasio efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara”.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Realisasi Anggaran

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif, antara lain

relevan, andal, sebanding, dan dapat dipahami. Laporan keuangan ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan yang mengungkapkan informasi mengenai realisasi pendapatan (LRA), belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan. Semua data tersebut dibandingkan dengan anggaran pada satu periode tertentu. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dilakukan paling tidak sekali setahun. Dalam keadaan khusus, tanggal laporan dapat berubah, dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan dapat melibatkan periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun. Laporan ini memberikan manfaat sebagai nilai prediktif, digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan proyeksi kebijakan keuangan, serta sebagai nilai umpan balik untuk evaluasi manajemen. Laporan realiasi anggaran mencakup beberapa elemen yang membentuk satu kesatuan dalam penyusunan laporan pelaksanaan anggaran.

Penilaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah penilaian terhadap aktivitas untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan suatu entitas dalam melaksanakan pekerjaannya dan menilai apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah dapat mengukur tingkat kinerja keuangan guna memahami pencapaian keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Dalam mengukur tingkat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangannya maka digunakan analisis rasio keuangan. Jenis rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Rasio Efektifitas

Rasio ini berisi perbandingan antara realisasi PAD dan anggarannya. Kemampuan daerah bisa dikatakan efektif, apabila rasio efektifitas bernilai sebesar minimal 100%. Berikut adalah tabel kriteria rasio efektivitas keuangan daerah :

Tabel 2.
Kriteria Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi memuat informasi terkait jumlah dana yang dikeluarkan untuk pengeluaran dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Jika rasio yang dihasilkan kurang dari 100%, maka dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah tersebut efisien. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah. Tabel berikut menunjukkan standar rasio efisiensi keuangan daerah :

Tabel 3.
Kriteria Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode deskriptif kuantitatif. Dengan objek dalam penelitiannya adalah Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara Tahun 2018–2022. Laporan Realisasi Anggaran tersebut diperoleh dari web resmi Pemerintah Sumatera Utara https://sumutprov.go.id/indeks-pengelolaan-keuangan-daerah?per_page=2.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan pemerintah daerah yang diperoleh sesuai tujuan penelitian yakni mengetahui bagaimana tingkat kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018–2022 dengan menghitung rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian. Adapun perhitungan yang dimaksud disesuaikan dengan rumus sebagai berikut:

a. Rasio Efektifitas

Rasio ini diukur dengan membandingkan kinerja dan anggaran PAD. Kemudian, tingkat rasio pendapatan dikelompokkan menurut standar yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No. 690.900.327 pada tahun 1996. Rumus untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi

Dalam menghitung rasio efisiensi kinerja pemerintah daerah digunakan perbandingan antara total biaya perolehan beban dan pendapatan. Hasil perhitungan ini kemudian diklasifikasikan menurut standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1996 No. 690.900.327. Rumus untuk indeks efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas

Kinerja Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara bisa dikatakan efektif bila tingkat rasio yang efektifitas yang diperoleh mencapai lebih dari 100%. Tingginya nilai rasio efektivitas menunjukkan baiknya kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam menggunakan pendapatannya. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas yang dijelaskan di atas didapatkan hasil efektivitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dari tahun 2018–2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.

Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja Sumut Tahun 2018-2022 (Rp)

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio	Kriteria
2018	2.362.458.300,00	2.352.000.000,00	100,45%	Sangat Efektif
2019	1.777.481.300,00	2.362.458.000,00	75,23%	Kurang Efektif
2020	2.006.757.700,00	1.505.000.000,00	133,33%	Sangat Efektif
2021	1.769.698.740,00	1.910.000.000,00	92,65%	Efektif
2022	12.000.000,00	1.510.000.000,00	0,79%	Tidak Efektif
Rata-rata			80,49%	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel hasil perhitungan rasio efektivitas kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dari tahun 2018-2022 diatas, maka tingkat Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara pada tahun 2018 berada pada tingkat 100,45% yaitu dengan kriteria sangat efektif, tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 25,10%

menjadi 75,23% dengan kriteria kurang efektif, tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 77,23% menjadi 133,33% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 30,52% menjadi 92,65% dengan kriteria efektif, tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 99,14% menjadi 0,79% dengan kriteria tidak efektif.

Rata-rata tingkat efektivitas tahun 2018–2022 sebesar 80,49% berada dalam pencapaian 80%-90% yaitu dalam kriteria cukup efektif. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan di Dinas Tenaga Kerja dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mencapai anggaran pendapatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan di Dinas Tenaga Kerja masih belum tercapai.

Rasio Efisiensi

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dapat dikatakan efisien apabila hasil nilai rasio efisiensi yang diperoleh pemerintah kurang dari 80%. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kemampuan pengeluaran publik untuk menghasilkan pendapatan. Hasil dari perhitungan rasio efisiensi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 5.

Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja Sumut Tahun 2018-2022 (Rp)

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio	Kriteria
2018	50.074.261.993,00	2.362.458.300,00	21,19%	Sangat Efisien
2019	49.453.131.346,00	1.777.481.300,00	27,82%	Sangat Efisien
2020	41.876.466.317,00	2.006.757.700,00	20,86%	Sangat Efisien
2021	47.022.066.385,16	1.769.698.740,00	26,57%	Sangat Efisien
2022	59.069.323.583,00	12.000.000,00	4,92%	Sangat Efisien
Rata-rata			25,43%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.2, tingkat rasio efisiensi untuk kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018–2022 sudah mencapai kriteria sangat efisien. Dengan hasil persentase dari rasio di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2018 sebesar 21,19% dengan kriteria sangat efisien, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 31,29% yaitu menjadi 27,82% dengan kriteria sangat efisien, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 21,90% yaitu menjadi 20,86% dengan kriteria sangat efisien, tahun 2021 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 27,37% menjadi 26,57% dengan kriteria sangat efisien, dan tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 81,49% menjadi 4,92% dengan kriteria sangat efisien. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan semakin baik. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900- 327 Tahun 1996.

Berdasarkan perhitungan efisiensi pada Dinas Tenaga Kerja di lihat dari laporan realisasi anggaran tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi realisasi belanja dan realisasi pendapatan Dinas Tenaga Kerja mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata tingkat efisiensi tahun 2018–2022 sebesar 25,43% berada dalam pencapaian >60% yaitu dalam kriteria sangat efisien. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan di Dinas Tenaga Kerja Sumut dapat dikatakan sangat efisien. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mengefisienkan pendapatan dan belanja sudah baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas laporan realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2022 rata-rata sebesar 80,49% yang termasuk dalam kriteria cukup efektif, menunjukkan kemampuan Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan masih kurang maksimal. Sedangkan tingkat efisiensi laporan realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2022 rata-rata sebesar 25,43% yang termasuk dalam kriteria sangat efisien, menunjukkan kemampuan Dinas Tenaga Kerja dalam mengelola anggaran belanja dan pendapatan sudah baik. Secara umum, kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2022 dapat dikatakan cukup baik berdasarkan analisis rasio efektivitas dan efisiensi yang menunjukkan hasil cukup efektif dan sangat efisien. Akan tetapi masih perlu peningkatan kinerja untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara yang dapat menjadi pertimbangan yakni Dinas Tenaga Kerja perlu meningkatkan upaya penerimaan pendapatan agar dapat mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, perlu adanya evaluasi rutin terhadap pelaksanaan dan realisasi anggaran untuk mengetahui kendala dan perbaikan yang dapat dilakukan, serta meningkatkan pengelolaan anggaran menjadi lebih hemat dan efisien dengan melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- A.N.J. Dien., J. Tinangon., S. Walandouw. (2015, Maret). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 3, No.1.
- Amanda. R, Arief. K, Ishak. J. F. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. Politeknik Negeri Bandung. Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*. (Vol 2, No. 1, pp. 52 – 62).
- Dona, E. M. Lestari, V.A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilia Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. Universitas Baturaja. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol 5, No 2.
- Fitra. H, Efendi. Z. I. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Universitas Negeri Padang. Padang. *Menara Ilmu*. Vol XIV, No.01.
- Peraturan.bpk.go.id. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Diakses pada 19 Januari 2024, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Peraturan.bpk.go.id. Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Diakses pada 19 Januari 2024, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Peraturan.bpk.go.id. Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Diakses pada 19 Januari 2024, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Ruliaty. Badollahi, I. Nurfadillah, A. I. (2019). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. Vol 1, No 1.
- Tooy. R. G. Saerang. D. P. E. Mawikere. L. (2016). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) Kaupaten Minahasa Utara. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 16, No. 04.